

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Foreword, United Nation Convention Against Corruption dalam *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Gurvitch Georges, 1961, *Sosiologi Hukum*, Bharatara, Jakarta.
- Indarti Erlyn, 2002, *Diskresi Polisi*, UNDIP, Semarang.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, alih bahasa Somardi, 1995, Cetakan I, Rimdi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi ke 16, Paradigma, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Muktar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung.
- Robert Klitgaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta.
- Robert Klitgaard dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Gramedia, Jakarta.
- S. Nasution, 2006, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor : 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah :

Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September, Semarang, 2017

Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungannya dengan Predicate Crime*, MMH, Jilid 42, No 1, Januari, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, MMH, Jilid 42, 1 Januari 2013.

Eddy O.S Hiariej, 2015, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, Indonesia Corruption Watch.

Hulman Siregar, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Laporan Tahunan KPK 2017*, KPK, Jakarta

Lawrence M. Friedman, "On Legal Development" Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969.

Naskah Akademik, 2015, *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, Semarang, 2018

Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember, Semarang, 2017

D. Internet dan Sumber-sumber lainnya :

Barda Nawawi Arief, *Pelatihan Tematik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer*, Surabaya, Maret 2013

Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Jateng, pada 1 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kejaksaan.go.id, *Kejaksaan Republik Indonesia*, diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1.

KOMPAS.com, *Memaknai Tertangkap Tangan*,
<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170929/281595240727553>.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap terkait Perizinan di Kabupaten Cirebon*,
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1355-kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-suap-terkait-perizinan-di-kabupaten-cirebon>

Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sng.

Romli Atmasasmita, dalam SINDONEWS.com, *OTT KPK*,
<https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>.

Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=hsSaUWXNgHQ>,

Youtube, *Operasi Tangkap Tangan KPK-Prof. Eddy O.S. Hiariej*,
<https://www.youtube.com/watch?v=SgBtwjcnYEM>.

